

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Arif, Saiful. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Averroes Press.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darwin, Muhajir. 1992. *Hasil Loka karya, Analisa Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dewi, RK. 2016. *Studi Analisis kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, Malayu SP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J.S. Badudu Sultan Mohhammad Zain.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kumorotomo, Wahyudi.2005. *Mewujudkan Good Government Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Moleong, LJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- _____. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukarom, Zaenal. Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muri, YA. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitaitaif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

- Naim, Ngainun. 2017. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-ruzzMedia.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode penelitian*. Bogor Selatan: Graha Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratminton dan Atik Septi Winarsih, 2009. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Juniarso. Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*.Bandung: Penerbit NUANSA.
- Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sinambela, LP. 2005. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan danImplementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV AndiOffset.
- Subarsono.AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)*. Syafiie, IK. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Thoha, Mifta. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Alfabeta.
- Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di LembagaKeuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, *tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *tentang Pelayanan Publik*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Asas-Asas Penyelenggara Pelayanan Publik,*

PERATURAN PEMERINTAH

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang pelayanan publik.*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota,* pada Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 *tentang Kecamatan.*

Qanun Nomor 8 Tahun 2008 *Tentang pelayanan publik.*

PERMENDAGRI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, *tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 8 (2) Nomor 4 tahun 2010, *tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 10 Nomor 4 tahun 2010, *tentang sarana prasarana penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 11 Nomor 4 tahun 2010, *tentang pelaksanateknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 *tentang*

Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 *tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 138/391 Tahun 2019 *Tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues.*

SKRIPSI dan JURNAL

Berkat Trima Hulu, "*Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2017.

Ery Silvana Siregar, "*Implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2017.

Sofyan Arifian Hasibuan, "*Analisis Persiapan Kebijakan "PATEN" (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2015.

Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6 (1) (2018): 47-57 *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, (diakses pada 13 maret 2019).

INTERNET

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota.kabupaten-Probolinggo-Jawa-Timur-.html#.xac4ywhkjiu>(diakses pada tanggal 25 Februari 2023)

<http://aceh.tribunnews.com/amp/2011/07/28/pelayanan-publik-galus-lumpuh-total> (diakses 13 maret 2023 jam 16.22)